



**Non-nompliance terhadap Konvensi Ilo Oleh Pemerintah Yordania:
Studi Kasus Pekerja Anak Pengungsi Suriah**

Cindana Ekki Prativi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Jordan is a host country for Syrian refugees despite the fact that they have not ratified the 1951 Refugee Convention. The high cost of living and the difficulty of obtaining legitimate employment in Jordan encouraging of child labor cases from Syrian refugees who are vulnerable to exploitation. In this case, Jordan has actually ratified the ILO Convention on child labor, but there are still many illegal displaced child laborers. This study aims to describe the attitude of non-compliance Jordan in adopting ILO convention. In this study, the authors use the concept of non-compliance of the theory of the international regime to explain that the state is not always willing to comply with international instruments that have been agreed. The research method used is qualitative which is done by collecting and analysing data, to find out the reason behind Jordanian non-compliance even though the government has ratified ILO Conventions. In this study, factors that resulted in the attitude of non-compliance of Jordan, such as the ambiguity of the interpretation of the ILO's Conventions by the Jordanian government, the limited capability of the state, and the influence of the temporal dimension in the country.

Keywords: *child labors, Syrian refugees, ILO Convention, non-compliance, international regime theory*

Pendahuluan

Pergolakan yang terjadi di Negara Suriah tampaknya telah menjadikan para anggota dari kelompok militan NIIS di negara tersebut semakin membabi buta sistem pertahanan negara menjadi 'pasif' dan mati. Dalam sekejap Suriah menjadi lahan liar akibat dari aktivitas terorisme. Beberapa organisasi internasional yang memang memiliki tanggungjawab atas korban dari '*humanitarian catashtrophe*' ini meminta bantuan berupa gencatan senjata dari beberapa negara adidaya yang memang pada dasarnya memiliki *basic* militer yang terbilang cukup kuat, seperti Negara Amerika Serikat dan Russia, yang pada akhirnya juga akan melibatkan negara-negara lain seperti Turki, Australia, dan lain-lain dalam upaya pemberantasan kelompok militan NIIS di Suriah (Reuters 2015). Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya konflik di Suriah, yang diyakini sebagai faktor pendorong konflik tersebut terus berlangsung hingga kini, yakni Presiden Bashar al-Assad beranggapan bahwa penyebab konflik Suriah berawal dari Amerika Serikat dan Irak pada tahun 2003, sebagai akibat dari adanya tindakan invasi dari pihak Amerika, yang kemudian menimbulkan pergolakan dari ISIS untuk merebut wilayah dan melawan pemerintah Suriah. Keterlibatan berbagai pihak justru semakin memperkeruh keadaan di dalam negara Suriah, hingga memicu munculnya pihak kontra dan pro atas kebijakan pemerintah Suriah, yang dimana Rusia menyatakan dirinya sebagai pihak yang pro dengan

Presiden Assad, sebaliknya, Amerika merupakan pihak koalisi yang anti terhadap ISIS dan oposisi dari rezim Presiden Suriah (Muhaimin 2015).

Dari konflik tersebut mengakibatkan penduduk Suriah yang berimigrasi ke negara lain, UNHCR telah menyebutkan jumlah keseluruhan pengungsi asal Suriah yang telah terdaftar, yakni kurang lebih 4,288,672 miliar warga Suriah yang telah meminta bantuan kepada UNHCR di beberapa negara, seperti Mesir, Iraq, Yordania, Lebanon, Turki, dan juga Afrika Utara (UNHCR 2015). Tercatat pada 3 Maret 2016, Jordan menjadi *host country* bagi 639.704 pengungsi Suriah yang sudah terdaftar secara sah di UNHCR. Sekitar 80% pengungsi hidup di daerah perkotaan dan sisanya tinggal di tiga *camp* utama : Zaatari, Azraq dan Emirat-Jordanian (*Amnesty Internasional* 2016, hal. 10). Sebagian besar pengungsi Suriah yang tidak tinggal di kamp akan memilih untuk tinggal di beberapa wilayah lainnya, seperti Al-Mafraq, Irbid, dan pusat kota Amman (Paolo Verme et al. 2016, hal. 6). Masih banyak pengungsi yang belum terdaftar oleh UNHCR, kondisi ini mempersulit ketersediaan data terkait jumlah pengungsi yang tinggal di *camp* dan daerah perkotaan (*Amnesty Internasional* 2016, hal. 10).

Hanya ada sebagian besar dari pengungsi Suriah di Yordania yang memutuskan untuk bersekolah. Di dalam populasi itu, ada sekitar 34% anak yang memutuskan untuk berhenti sekolah dan di satu sisi terdapat kasus yang menyebutkan bahwa 3,6% keluarga pengungsi yang anaknya memilih untuk bekerja (Paolo Verme, et al. 2016, hal. 9). Terlebih lagi, menurut Perwakilan *UNICEF* untuk wilayah Yordania, Michele Servadei, di negara tersebut telah terjadi kasus pelanggaran terhadap anak, yaitu dimana para anak laki-laki usia 8 tahun akan direkrut untuk menjadi tentara tempur, sedangkan anak-anak perempuannya akan dijadikan sebagai budak seks atau dipaksa untuk melakukan nikah usia dini, dan banyak terjadi pekerja anak yang berkisar sekitar 3.500 anak. Di samping itu, faktor yang juga memicu keadaan pengungsi Suriah semakin memburuk yakni karena di Yordania fasilitasnya belum cukup memadai (Karta Raharja Ucu 2013). Kantor Bagian Pemeriksaan Tenaga Kerja Anak di Kementerian Tenaga Kerja Yordania, menjelaskan bahwa di tahun 2013-2014 pengungsi anak asal Suriah memilih untuk bekerja di sektor *informal* (*Open Society Foundations* 2015, hal. 19-20).

Pembahasan

Dua bentuk konvensi ILO yang digunakan untuk menangani pekerja anak yakni Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 tentang usia minimum untuk masuk kerja yang diratifikasi Yordania pada 1997. Untuk pasal ini, negara peratifikasi diharuskan untuk melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk bekerja karena dikhawatirkan akan mengganggu pendidikannya. Sedangkan Konvensi ILO No. 182 yang diratifikasi oleh Yordania pada tahun 2000, berupaya menangani penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dalam hal ini, anak-anak tidak diperbolehkan untuk memiliki pekerjaan yang berbahaya dan melelahkan (*The Phenix Center for Economics and Informatics Studies dan Friedrich Ebert Stiftung* 2012, hal. 1-2). Di Yordania ada sekitar 60.000 pengungsi anak dari Suriah yang bekerja, terutama dari usia 5 tahun sampai 16 tahun. Sebagian besar anak-anak bekerja karena didasari oleh beberapa alasan, seperti : ingin membantu perekonomian orang tua; tidak suka belajar di sekolah; ingin memiliki pendapatan sendiri; diperintah oleh orang tua; ataupun karena alasan yang lain. Namun, di usia yang masih sangat muda, mereka yang memilih untuk menjadi pekerja anak, tidak bisa lepas dari adanya kondisi bahaya dan tindakan eksploitasi dari majikan (*Euro-Mediterranean Human Rights Monitor* 2016, hal. 2). Banyak pemilik usaha yang sengaja memanfaatkan mereka sebagai sarana untuk memperoleh laba namun dengan cara memforsir tenaga kerja anak dan menyalahgunakan hak mereka sebagai seorang anak. Adapun kondisi terburuk yang seringkali dialami oleh para pekerja anak

selama masa bekerja, yakni seperti mendapatkan gaji kecil, jam kerja yang panjang, adanya pressure dari lingkungan kerja atau majikan, kurang tersedianya alat keselamatan kerja, dan tempat kerja yang kurang memadai (Euro-Mediterranean Human Rights Monitor 2016, hal. 2). Di dalam UU Ketenagakerjaan Yordania menjelaskan bahwa pekerja anak memperoleh hak yang sama dengan pekerja dewasa di negara tersebut, meskipun di Yordania belum terdapat UU perlindungan anak nasional yang efektif dalam menangani kasus pekerja anak, maka Jordanian Labour Law 1996 digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan eksploitasi terhadap pekerja anak di tempat kerja (Open Society Foundation 2015, hal. 8).

Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 yang mengatur mengenai pekerja anak, dinilai belum cukup berkontribusi dalam mengurangi jumlah pekerja anak yang ada di negara Yordania, terlebih lagi semenjak kehadiran pengungsi Suriah. Pekerja anak yang berasal dari komunitas pengungsi masih banyak yang harus bekerja di sektor kecil dan illegal, ini menandakan bahwa di kondisi pasar kerja Yordania semakin terisi penuh dengan kompetitif tenaga kerja dari kedua komunitas tersebut, penduduk asli dan pengungsi. Dengan adanya arus pengungsi Suriah di Yordania, membuat Konvensi ILO yang diratifikasi pemerintah tersebut menjadi cara pemerintah lokal belum menerapkan kewajiban mereka sebagai negara peratifikasi konvensi internasional secara utuh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori rezim yang membahas tentang sikap ketidakpatuhan negara terhadap hukum internasional untuk menganalisa faktor penyebab masih adanya pekerja anak pengungsi Suriah yang berada di Yordania, meskipun pada dasarnya pemerintah Yordania sudah meratifikasi Konvensi ILO tentang pekerja anak. Adapun 3 penyebab non-compliance negara terhadap konvensi internasional, yakni : ambiguitas, terbatasnya capability negara, serta pengaruh dari adanya dimensi temporal (Chayes & Chayes 1995, hal. 10).

Faktor pertama, yaitu Ambiguitas dalam Menginterpretasikan Konvensi ILO Tentang *Child Labor* Oleh Yordania. Dalam hal ini, perjanjian internasional menggunakan bahasa yang sulit dimengerti dan memiliki cakupan pembahasan yang luas dan umum. Tentu saja sifat ambiguitas tersebut akan mempengaruhi interpretasi dari masing-masing negara (Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes 1993, hal. 188-189). Jadi, menurut negara, apabila bahasa konvensi cakupannya terlalu luas, maka tidak ada kewajiban spesifik dari negara untuk menerapkannya secara menyeluruh. Dan salah satu pemicunya adalah seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan negara dari adanya konvensi internasional tersebut. Dari adanya kasus pengungsi di negaranya, pihak Yordania merasa diuntungkan dari adanya arus pengungsi, yakni karena tingginya bantuan internasional yang disalurkan untuk Yordania. Mengingat pada awal konflik Suriah terjadi, Yordania menerapkan *open door policy* kepada pengungsi karena pada saat itu pula *foreign aid* dan *FDI* dari pemerintah Suriah yang tersedia masih besar jumlahnya. Setelah beberapa tahun konflik terjadi, pemerintah Yordania terkesan secara tiba-tiba menutup perbatasan negara dan memberikan *limited service* bagi pengungsi. Hal tersebut terjadi semenjak kurungan dana yang diberikan oleh pihak internasional semakin berkurang (ACAPS 2016, hal. 3). Sejak konflik Suriah terjadi, Yordania memperoleh investasi sebesar 50 juta JOD. Investasi yang berasal dari Suriah ini menyebar ke 385 sektor industri dan komersial. Dan investasi ini dinilai juga memberikan kontribusi untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi komunitas Yordania dan meningkatkan penghasilan ekspor negara Yordania (International Labour Organization Regional Office for Arab States 2015, hal. 16).

Terjadinya konflik Suriah mengakibatkan banyak pengungsi berimigrasi ke Yordania. Sebagai *host country* dari para pengungsi, jelas bahwa Yordania merasa memiliki *power* yang besar atas kasus ini, sehingga pemerintah merasa bahwa dengan adanya arus pengungsi di negaranya, maka akan lebih baik jika Yordania tidak

menerapkan konvensi pekerja anak secara utuh, karena bagi mereka itu kurang berguna, sebab selama konflik di Suriah belum berakhir maka jumlah pekerja anak akan semakin meningkat seiring dengan masuknya pengungsi ke wilayah Yordania, meskipun itu bertentangan dengan Konvensi ILO (Care International 2015). Dalam kasus pengungsi, Yordania sendiri memang bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 tetapi mereka bersedia untuk menjadi host country bagi warga pendatang dari Suriah. Dan karena rasa pride tersebut, Yordania seolah-olah ‘memanfaatkan’ keuntungan dari kebijakannya terhadap kelompok pengungsi Suriah, sehingga bagi mereka adanya sikap ketidakpatuhan terhadap Konvensi ILO yang mengatur tentang child labor, tidak akan menjadi masalah yang besar, sebab, selama negara mereka masih menerapkan open door policy, maka hanya kebaikan itu yang akan dilihat oleh pihak eksternal, bukan mengenai sikap non-compliance mereka terhadap Konvensi ILO tersebut (Luigi Achilli, Migration Policy Centre dan European University Institute 2015, hal. 3).

Faktor kedua adalah terbatasnya *capability* Yordania. Yang mengharuskan bahwa negara dan aktor sub-negara harus memiliki pandangan yang sama untuk bisa memenuhi komitmen mereka dalam hukum internasional yang sudah diadopsi. Sebab di konvensi internasional, pemerintah dari suatu negara harus bisa mempengaruhi perilaku semua entitas masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Kegagalan pemerintah akan terlihat jika keputusan yang diambil justru tidak sesuai dengan kepentingan negara dan masyarakatnya (Ronald B. Mitchell 2007, hal. 909). Adanya kasus pekerja anak yang berasal dari pengungsi Suriah masih menjadi hambatan bagi pemerintah Yordania untuk bisa mempengaruhi masyarakatnya, sebab di sana jumlah pengawas ketenagakerjaan masih relatif sedikit, dan juga belum tersedia prosedur yang jelas tentang cara menangani pekerja anak dari kelompok pengungsi (Save The Children dan UNICEF 2015, hal. 11). Selain itu, kampanye inspeksi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dinilai masih belum bisa menghentikan tindak penyalahgunaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha (The Phenix Center for Economics and Informatics Studies dan Friedrich Ebert Foundation 2011, hal. 14-16).

Di samping itu, masih banyak pula pengusaha yang tidak takut dituntut atau dikenai denda karena mempekerjakan anak-anak. Maksimal sanksi denda yang berlaku di Yordania sebesar 500 JOD. Menurut penuturan dari “*Child Labour Department of the Ministry of Labour*”, denda tidak selalu diberikan, meskipun telah terjadi pelanggaran, dan masih banyak pemilik usaha yang mempekerjakan anak-anak (Open Society Foundation 2015, hal. 18). Selama ini pihak luar hanya melihat dari sisi kondisi pengungsi Suriah yang ‘menderita’ di Yordania. Namun, bagi pemerintah dan masyarakat Yordania, keberadaan pengungsi Suriah yang diperburuk dengan menurunnya bantuan internasional, semakin memperburuk keadaan di kedua komunitas. Mayoritas pengungsi yang memang berada dalam kemiskinan sangat bergantung pada bantuan internasional. Antara pengungsi dan masyarakat lokal sering terjadi perselisihan, dalam hal tenaga kerja dan tempat tinggal. Penduduk Yordania yang miskin justru harus rela tinggal di *camp* pengungsi karena diusir oleh pemilik rumah yang hendak menyewakan rumahnya kepada orang Suriah. Selain itu, penduduk lokal juga merasakan bahwa selama ini bantuan internasional selalu diprioritaskan untuk pengungsi Suriah saja, meskipun pada kenyataannya banyak juga warga Yordania yang membutuhkan bantuan (Doris E. Carrion 2015, hal. 6).

Dan faktor yang ketiga yaitu adanya pengaruh dimensi temporal di Yordania. Terkadang negara tersebut merasa *dilemma* untuk membuat prioritas utama mereka, karena terbentur dengan hukum internasional yang harus mereka jalani, sedangkan di sisi lain kondisi domestik negara juga mengalami ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik. Dan salah satu faktor yang melatarbelakangi ketidakpatuhan negara menurut Chayes & Chayes, yaitu karena adanya prioritas lain yang lebih diutamakan negara, karena sifatnya lebih

penting daripada hukum internasional yang mereka adopsi (Chayes & Chayes 1995). Dalam hal ini, pemerintah Yordania memilih untuk bersikap tidak mematuhi Konvensi ILO secara utuh, karena pada kenyataannya pemerintah itu sendiri juga harus fokus untuk menyelesaikan masalah lain yang lebih penting dari adanya kasus pekerja anak dari pengungsi Suriah. Pemerintah merasa bahwa hal terpenting yang harus ditangani seperti : beban biaya yang harus ditanggung Yordania untuk menghidupi pengungsi dari Suriah, mengatasi kegiatan ekspor Yordania yang semakin menurun setelah terjadinya konflik, menjaga stabilitas negara dari pengaruh konflik Suriah, serta menjadi anggota yang pro-aktif dalam upaya anti terorisme untuk melawan ISIS.

Masalah pertama yang menjadi prioritas pemerintah Yordania, yaitu biaya untuk pengungsi Suriah di negaranya sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, pemerintah berusaha melakukan beberapa kerjasama dengan pihak eksternal, seperti : Eropa, Amerika, Arab Saudi, UNICEF, Perancis, Swedia, Belanda, dan lainnya (Save the Children Sweden Regional Office for the Middle East and North Africa 2011, hal. 29). Yordania yang pada dasarnya merupakan negara dengan tingkat perekonomian yang cukup rendah, telah mengalami kenaikan anggaran untuk membiayai pengungsi Irak, Palestina, dan juga Suriah. Karena kehadiran mereka, pemerintah semakin berusaha untuk memenuhi kebutuhan bagi pengungsi di beberapa sektor yakni : makanan, pendidikan, kesehatan, pasokan air bersih, shelter, energi, lingkungan, pekerjaan, transportasi, serta perlindungan sosial dan hukum. Menurut laporan dari Ministry of Planning and International Cooperation The Hashemite Kingdom of Jordan pada tahun 2015, disebutkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pengungsi berkisar sekitar 889,038,530 US\$ (United Nations dan Jordan Response Platform 2015, hal. 15).

Kasus kedua yang juga dinilai sangat penting bagi Yordania adalah mengenai kegiatan ekspor negara yang semakin menurun pasca terjadinya konflik Suriah. Kegiatan impor Yordania mengalami kenaikan akan tetapi ekspor menurun dan menimbulkan ketidakseimbangan pada sektor perdagangan. Yordania harus rela kehilangan Suriah sebagai salah satu rute perdagangan utama dan negara transit mereka untuk ke Swedia, Turki, Lebanon, dan Eropa. Sebagai dampaknya, Yordania harus mempertimbangkan rute alternatif lain meskipun dengan biaya yang mahal, seperti Irak dan Pelabuhan Aqaba (Ministry of Planning and International Cooperation The Hashemite Kingdom of Jordan dan United Nations 2013, hal. 22). Suriah pada dasarnya merupakan salah satu mitra dagang terpenting bagi Yordania dalam hal ekspor. Pada tahun 2014 antara Suriah dan Yordania masih terjadi kegiatan perdagangan yang rutin, namun, ketika menginjak tahun 2015 kegiatan tersebut sudah tidak pernah terjadi lagi. Sebagian besar rute dagang dilakukan melalui zona bebas, tetapi semenjak adanya peningkatan harga transportasi dan harga barang impor produksi Yordania seluruh kegiatan perdagangan menjadi terganggu (Akram Masoud Haddad (n.d.), hal. 145-155).

Yang ketiga, yakni memburuknya fasilitas umum di Yordania setelah kehadiran pengungsi Suriah juga semakin terasa. Terlebih lagi yang berkaitan dengan krisis air, penuhnya kapasitas sekolah, manajemen pembuangan limbah yang kurang baik, serta tingginya angka pengangguran bagi komunitas Yordania, hal itu secara langsung mempengaruhi kondisi domestik negara menjadi tidak stabil. Banyak penduduk Yordania yang menyalahkan ketidakstabilan ini pada pengungsi dan pemerintah, karena tidak meratanya bantuan dan menurunnya fasilitas umum (Alexandra Francis 2015, hal. 8). Semenjak hadirnya pengungsi Suriah, di Yordania mengalami krisis air bersih, menurut laporan dari Departemen Air dan Irigasi Yordania, tingkat penggunaan air di Yordania meningkat sebesar 16% pada 2013. Berdasarkan laporan dari Mercy Corps, di antara kedua komunitas itu, pada kenyataannya pengungsi Suriah yang memerlukan dan memakai kapasitas air dua kali lipat lebih banyak daripada orang Yordania (Alexandra Francis 2015,

hal. 16). Di bagian Utara kota, limbah rumah tangga semakin meningkat, ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan, mengingat di camp Za'atari belum tersedia manajemen limbah yang baik (Ministry of Planning and International Cooperation The Hashemite Kingdom of Jordan dan United Nations 2013, hal. 10).

Sejak awal tahun 2012, pengungsi Suriah menjadi ancaman bagi masyarakat Yordania, sebab mereka harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di sektor informal. Menurut laporan dari Ministry of Planning and International Cooperation The Hashemite Kingdom of Jordan pada tahun 2013, jumlah pengangguran warga Yordania lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan pengungsi yang tidak bekerja, yakni sekitar 144.987 orang menganggur di wilayah Mafrq, Irbid, Zarqa', dan Amman (Ministry of Planning and International Cooperation The Hashemite Kingdom of Jordan dan United Nations 2013, hal. 30). Masalah yang juga diprioritaskan oleh pemerintah Yordania yaitu mengenai koalisi pro-aktif untuk melawan ISIS di Suriah. Peran Yordania sendiri dalam koalisi anti ISIS yang dipimpin AS sangatlah penting. Berdasarkan laporan Badan Riset Kongres AS pada 2 Desember 2014, menyebutkan bahwa Yordania berperan baik dalam memberikan informasi intelijen pada koalisi, pelatihan pasukan khusus Irak, dan membuka pelatihan untuk memata-matai pemberontak Suriah (Denny Armandhanu 2015). Selain itu, pada tahun 2015, Yordania juga turut bergabung dengan koalisi militer Islam bentukan dari Arab Saudi. Koalisi yang berpusat di Riyadh ini dibentuk sebagai salah satu upaya kerjasama untuk memerangi kegiatan terorisme dan melindungi negara Islam dari para teroris (Muhaimin 2015).

KESIMPULAN

Terkait masalah pekerja anak pengungsi Suriah di Yordania, menggambarkan dengan jelas bahwa pada kenyataannya setiap negara tidak dapat sepenuhnya mematuhi instrumen hukum internasional, seperti Konvensi ILO tentang *child labor*. Sejalan dengan kerangka teori yang telah digunakan penulis, yakni sikap *non-compliance* yang terdapat dalam teori rezim internasional, menjelaskan bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Yordania terkait sikap ketidakpatuhan mereka terhadap Konvensi ILO, sehingga masih banyak terjadi *Syrian child labor* meskipun pemerintah sendiri sudah meratifikasi konvensi dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional yang ada di negara tersebut. Untuk menganalisis kasus ini, penulis menggunakan faktor-faktor pendorong sikap ketidakpatuhan negara, yakni ambiguitas, *incapability*, dan dimensi temporal.

Dalam hal ini, sikap ambigu itu muncul dari luasnya cakupan bahasa dalam konvensi internasional, sehingga Yordania menganggap bahwa tidak ada kewajiban secara spesifik bagi mereka dalam menerapkan Konvensi ILO. Hal itu tergantung pada seberapa banyak keuntungan yang akan didapatkan negara dari adanya Konvensi ILO tersebut. Terkait itu, Yordania merasa bahwa hadirnya pengungsi memberi keuntungan bagi Yordania karena dana bantuan ke yang diberikan semakin meningkat. Namun, dewasa ini pemerintah Yordania justru memilih untuk membatasi akses masuk dan layanan umum bagi pengungsi karena menurunnya bantuan internasional. Banyaknya kasus pekerja anak pengungsi Suriah dinilai tidak akan pernah berkurang selama konflik di Suriah sendiri juga belum berakhir, sebab semakin banyak pengungsi yang masuk ke negara Yordania, maka akan semakin banyak pula kasus pekerja anak yang terjadi. Selain itu, di mata dunia internasional, sikap *open door policy* yang pernah dilakukan oleh Yordania kepada pengungsi Suriah, dianggap sudah sangat terpuji. Hal ini akan menimbulkan persepsi bahwa yang akan dilihat pihak luar adalah kebaikan untuk menerapkan *open door policy*, bukan keburukan dalam hal ketidakpatuhan terhadap konvensi.

Selain faktor itu, juga ada masalah terkait terbatasnya kapabilitas negara Yordania dalam mengimplementasikan Konvensi ILO terkait *child labor*, karena di negara itu

pemerintahnya sendiri masih memiliki hambatan dalam mempengaruhi masyarakatnya. Di sana masih banyak pihak yang belum mampu untuk mengurangi terjadinya pekerja anak, seperti belum maksimalnya kinerja dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, rakyat sipil, dan pemilik usaha di negara itu. Adanya pengaruh dari dimensi temporal di Yordania juga sangat mempengaruhi kebijakan negara terhadap konvensi tersebut. Dan bagi Yordania sendiri, permasalahan yang sangat penting yakni beban biaya bagi pengungsi, memperbaiki kegiatan ekspor yang sedang mengalami penurunan, membantu melawan ISIS dengan cara bergabung dalam koalisi anti-terorisme, serta harus menangani ketidakstabilan negara sebagai akibat dari adanya pengungsi Suriah di Yordania.

Referensi

- ACAPS. (2016). *Syrian Refugees : Political and Financial Dynamics in Jordan*. Geneva : ACAPS.
- Achilli, Luigi, *Migration Policy Centre*, dan *European University Institute*. (2015). *Syrian Refugees in Jordan : a Reality Check*. Italia : *The Migration Policy Centre at the European University Institute*.
- Amnesty Internasional*. (2016). *Living On The Margins Syrian Refugees In Jordan Struggle To Access Health Care*. London : *Amnesty Internasional Ltd*.
- Armandhanu, Denny. (2015). *Menilik Peran Yordania dalam Perang Melawan ISIS*, dilihat 7 Februari 2018, <<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150204165017-120-29666/menilik-peran-yordania-dalam-perang-melawan-isis>>.
- CARE International*. (2015). *Syrian Refugees Facing Risks as Child Laborers, Loss Education, Says CARE*, dilihat 1 Oktober 2017, <<http://www.care.org/newsroom/press/press-releases/syrian-refugees-facing-risks-child-laborers-loss-education-says-care>>.
- Carrion, Doris E. (2015). *Syrian Refugees in Jordan Confronting Difficult Truths*. London : *The Royal Institute of International Affairs Chatham House*.
- Chayes, Abram dan Antonia Handler Chayes. (1993). *On Compliance : International Organization, Vol. 47, No. 2 (Spring, 1993)*. New England : *World Peace Foundation and the Massachusetts Institute of Technology*. pp. 175-205.
- Chayes, Abram dan Antonia Handler Chayes. (1995). *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. Cambridge : *Harvard University Press*.
- Euro-Mediterranean Human Rights Monitor*. (2016). *Among Syrian Refugee in Jordan*. Geneva : *Euro-Mediterranean Human Rights Monitor*.
- Francis, Alexandra. (2015). *Jordan's Refugee Crisis*. Washington DC : *Carnegie Endowment for International Peace*.
- Haddad, Akram Masoud. (n.d). *The Impact of Syrian Crises on the Jordanian External Trade*. Dubai : *American University in the Emirates*.
- International Labour Organization Regional Office for Arab States*. (2015). *Access to Work for Syrian Refugees in Jordan : a Discussion Paper on Labour and Refugee Laws and Policies*. Beirut : *International Labour Organization Regional Office for Arab States*.
- Ministry of Planning and International The Hashemite Kingdom of Jordan dan United Nations*. (2013). *Needs Assessment Review of the Impact of the Syrian Crisis on Jordan*. Jordan : *Ministry of Planing and International Cooperation The Hashemite Kingdom of Jordan*.

- Mitchell, Ronald B. (2007). *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law*, United Kingdom : Oxford University Press. pp. 893-921.
- Muhaimin. (2015). *10 Jawaban Assad Soal Perang Suriah, ISIS Hingga Propaganda Barat*, dilihat 6 Desember 2015, <<http://internasional.sindonews.com/read/1046458/43/10-jawaban-assad-soal-perang-suriah-isis-hingga-propaganda-barat-1442655821>>.
- Muhaimin. (2015). *Dipimpin Saudi, 34 Negara Bentuk Koalisi Islam Melawan Teroris*, dilihat 7 Februari 2018, <<https://international.sindonews.com/read/1069471/43/dipimpin-saudi-34-negara-bentuk-koalisi-islam-melawan-teroris-1450144872>>.
- Open Society Foundation. (2015). *Syrian Refugee Child Labour in Jordan and the Risk of Exploitation*. New York : Open Society Foundation.
- Reuters. (2015). *Solusi Damai Dirintis Sekjen PBB : Ada Lima Negara Penentu Konflik Suriah*, Berita harian Kompas edisi Selasa, tanggal 29 September 2015.
- Save the Children Sweden Regional Office for the Middle East and North Africa. (2011). *Country Profile of Jordan : A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child*. Beirut : Save the Children Sweden.
- Save the Children dan UNICEF. (2015). *Small Hands Heavy Burden : How the Syria Conflict is Driving More Children into the Workforce*. Jordan : Save the Children dan UNICEF.
- The Phenix Center for Economics Studies and Informatics dan Friedrich Ebert Foundation. (2011). *Challenges Facing the Jordanian Labor Market*. Jordan : Labor-Watch Jordan The Phenix Center for Economics and Informatics.
- Ucu, Karta Raharja. (2013). *UNICEF : Anak-Anak Suriah Dieksploitasi*, dilihat 7 Desember 2015, <<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/10/11/muhjlc-unicef-anakanak-suriah-dieksploitasi>>.
- UNHCR. (2015). *Syria Regional Refugee Response*, dilihat 6 Desember 2015, <<http://data.unhcr.org/syrianrefugee/regional.php>>.
- United Nations dan Jordan Response Platform. (2015). *Jordan Response Plan for the Syria Crisis*. Jordan : Ministry of Planning and International Cooperation The Hashemite Kingdom of Jordan.
- Verme, Paolo et al. (2016). *The Welfare of the Syrian Refugees : Evidence From Jordan and Lebanon*. Washington DC : UNHCR dan World Bank Group.